

PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA BAGI PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH

Maylen P. Kambuaya, Hastutie Noor Andriati

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

Training "Preparation Of Spending Standard Analysis Model (Asb) In Waropen District", which aims to know the fairness of financial budget and determine the model of analysis of spending standards that meet the fairness of education and training activities in the Waropen District Device Organization. The method used in this study is by approaching the cost performance of activities (ABC) and simple regression approach. While the data used is secondary data, in the form of existing activities of local government in the current year (in the form of Draft Budget Work or Budget Implementation Document - Regional Work Equipment Unit) and also secondary data in the form of unit price standards.

Proposed budgets that do not comply with the ASB will be analyzed or revised according to the established standards. The draft APBD is prepared based on the results of an assessment of the proposed budget of SKPD which is prepared based on ASB. For local governments, the Analysis of Spending Standards is expected to hold effective and efficient budget management and accountability of local governments that will later materialize good governance. Based on the explanation above, it appears that the existence of a standard analysis of shopping is a must. Without the analysis of spending standards, the APBD proposed by each SKPD will tend not to comply with the budget standards. As a result, the preparation of performance-based budgets that are expected to be able to improve the performance, efficiency, effectiveness, and accountability of local governments.

Keywords: *spending standard analysis model; internal supervision officer; local government*

ABSTRAK

Pelatihan "Penyusunan Model Analisis Standar Pengeluaran (Asb) Di Kabupaten Waropen", yang bertujuan untuk mengetahui kewajaran anggaran keuangan dan menentukan model analisis standar belanja yang memenuhi kewajaran kegiatan pendidikan dan pelatihan di Organisasi Perangkat Kecamatan Waropen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan cost performance of activities (ABC) dan pendekatan regresi sederhana. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder berupa kegiatan-kegiatan yang ada pada pemerintah daerah pada tahun berjalan (berupa RAPBN atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Perangkat Daerah) dan juga data sekunder berupa standar harga satuan. Usulan anggaran yang tidak sesuai dengan ASB akan dianalisis atau direvisi sesuai standar yang ditetapkan. Rancangan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap usulan anggaran SKPD yang disusun berdasarkan ASB. Bagi pemerintah daerah, Analisis Standar Pengeluaran diharapkan dapat mengadakan pengelolaan anggaran yang

efektif dan efisien serta akuntabilitas pemerintah daerah yang nantinya akan terwujud *good governance*. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa adanya standar analisis belanja adalah suatu keharusan. Tanpa analisis standar belanja, APBD yang diajukan oleh masing-masing SKPD akan cenderung tidak sesuai dengan standar anggaran. Alhasil, penyusunan anggaran berbasis kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Kata kunci: model analisis standar belanja; petugas pengawasan internal; pemerintah daerah

1. Pendahuluan

Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Reformasi anggaran daerah dimulai dengan penyusunan anggaran daerah yang tidak lagi mengacu kepada PP No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Perubahan kebijakan tentang anggaran terjadi mengikuti perubahan kebijakan pengelolaan keuangan negara. Salah satu bentuk perubahan kebijakan tersebut dengan mulai diberlakukannya PP No. 105 Tahun 2000, selanjutnya diganti dengan PP No. 58 Tahun 2005, yang diikuti dengan diterbitkannya Permendagri 13 tahun 2006.

Dasar hukum telah mensyaratkan perlunya ASB oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD. Namun hal ini tidak diimbangi dengan perwujudan ASB secara riil yang diperkenalkan oleh peraturan-peraturan tersebut kepada Pemerintah Daerah. Akibat dari tidak adanya wujud ASB secara riil tersebut maka timbulah berbagai masalah dalam penyusunan APBD. Berikut akan disampaikan masalah-masalah klasik dalam penyusunan APBD

- a. Plafon anggaran kegiatan pada Peraturan Daerah ditetapkan menggunakan "intuisi".
- b. Sulit menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan.
- c. Penyusunan dan penentuan anggaran menjadi subjektif.
- d. Dua atau lebih kegiatan yang sama mendapat alokasi yang berbeda.

Tuntutan transparan dan akuntabel atas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, terutama atas tuntutan akuntabel dapat dilakukan dengan cara pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan disebut dengan Analisis Standar Belanja (ASB).

Salah satu cara yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan secara ekonomis, efisien, dan efektif dengan menyusun standar biaya atau dalam bahasa resmi dalam Permendagri 13/2006 yaitu Analisis Standar Belanja (ASB).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan pelatihan penerapan analisis standar belanja bagi pengawas internal pemerintah daerah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan analisis standar belanja.

Kegiatan pelatihan ini diharapkan akan memberikan manfaat berikut:

(1) dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya; (2) meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan

Daerah; (4) penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan (5) unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

2.Kajian Pustaka

Analisis standar belanja (ASB) adalah suatu penilaian tentang kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penilaian tentang kewajaran memberi gambaran bahwa berbagai kegiatan didalam anggaran seyogyanya dapat diperbandingkan, baik diperbandingkan dengan harga atau standar belanja dan juga dapat diperbandingkan antar kegiatan. Analisis standar belanja berbeda dengan standar belanja tetapi sangat erat terkait. Adanya standar belanja akan memudahkan melakukan alokasi belanja, sementara analisis standar belanja adalah menilai apakah alokasi belanja sudah memenuhi kriteria dan tujuan belanja.

Analisis standar belanja ditetapkan berdasarkan undang-undang sampai kepada peraturan menteri. Di dalam Undang-Undang No.32/2004 disebutkan tentang ASB. Pada peraturan tersebut ditetapkan bahwa dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan adanya ASB tersebut. ASB digunakan untuk mempermudah pengguna anggaran dalam menyusun dan menilai efektifitas efisiensi dan ekonomisnya kegiatan-kegiatan dalam suatu anggaran. Oleh karenanya ASB harus dibuatkan pedomannya agar dapat menjadi rujukan dari semua unit pemerintah termasuk SKPD dalam menyusun dan menilai kegiatan yang diusulkan ke dalam anggaran.

1. Deskripsi

Deskripsi merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi dari suatu ASB. Deskripsi juga menjelaskan kepada para pengguna tentang gambaran singkat dan jelas mengenai jenis ASB. Dengan demikian, deskripsi akan mempermudah pengguna untuk mengetahui jenis ASB apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis program/kegiatan tertentu.

2. Pengendali belanja (*cost driver*)

Pengendali belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya / belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan. Pengendali belanja berbeda-beda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pemicu biaya belanja dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jpl, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, luas bangunan, durasi, dan lain-lain.

3. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan.

4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Satuan pengendali belanja merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Semakin tinggi target yang ditetapkan oleh satuan kerja (semakin optimis) maka semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya semakin rendah (pesimis) target kinerja yang ditetapkan maka makin kecil pula belanja variabel. Nilai belanja variabel merupakan perkalian antara nilai satuan belanja variabel dengan pengendali belanja (*cost driver*). Bobot/ indeks menunjukkan pembobotan kategori dari suatu aktivitas yang akan dilakukan yang meliputi bobot untuk tingkatan, bobot jenis, bobot

orang yang dinilai, bobot proses uji, dan lain-lain. Apabila ditemuipernyataan “ disesuaikan dengan “ maka hal ini menunjukkan bahwa perhitungan belanja variable harus dikalikan dengan bobot masing-masing.

5. Formula perhitungan Belanja Total

Merupakan rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara belanja tetap dan belanja variable.

6. Batasan Akolasi Obyek Belanja

Batasan Akolasi Obyek Belanja merupakan proporsi dari obyek belanja terhadap total belanja suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu rata-rata, batas bawah, dan batas atas. Ketiga proporsi tersebut disajikan dalam bentuk prosentase sehingga apabila akan menghitung besarnya proporsi untuk komponen belanja adalah dengan cara mengalikan proporsi tersebut dengan belanja total.

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Waropen dengan melakukan observasi lapangan, dan wawancara, serta penyajian materi terkait analisis standar belanja. Jadwal kegiatan pengabdian dilaksanakan selama satu minggu pada bulan oktober 2020.

4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

4.1 Agenda Kegiatan

Secara rinci rangkaian aktifitas penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Waropen, dapat di gambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Aktivitas Penyusunan ASB Kabupaten Waropen

NO	KEGIATAN
1	FGD, Data dan Informasi a. FGD Analisis Standar Belanja (ASB) b. Mengumpulkan Data dan informasi c. Memeriksa kesesuaian harga satuan d. Entry Data
2	Identifikasi dan Perumusan a. Mengidentifikasi jenis kegiatan, output, dan cost driver b. Menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dirumuskan ke dalam ASB c. Melakukan pengelompokkan awal
3.	Verifikasi dengan TIM Melakukan diskusi awal dengan Tim mengenai kondisi awal kelompok ASB
4.	Penyusunan dan Analisis Model a. penyusunan Model ASB b. Menghitung nilai maksimum dan minimum c. Menghitung besaran alokasi belanja (batas atas dan batas bawah) d. Menyusun lampiran ASB e. Menyusun Panduan ASB
5.	Workshop Desiminasi ASB

NO

KEGIATAN

6. Finalisasi Dokumen Panduan ASB

Penyempurnaan hasil panduan berdasarkan input pada saat workshop

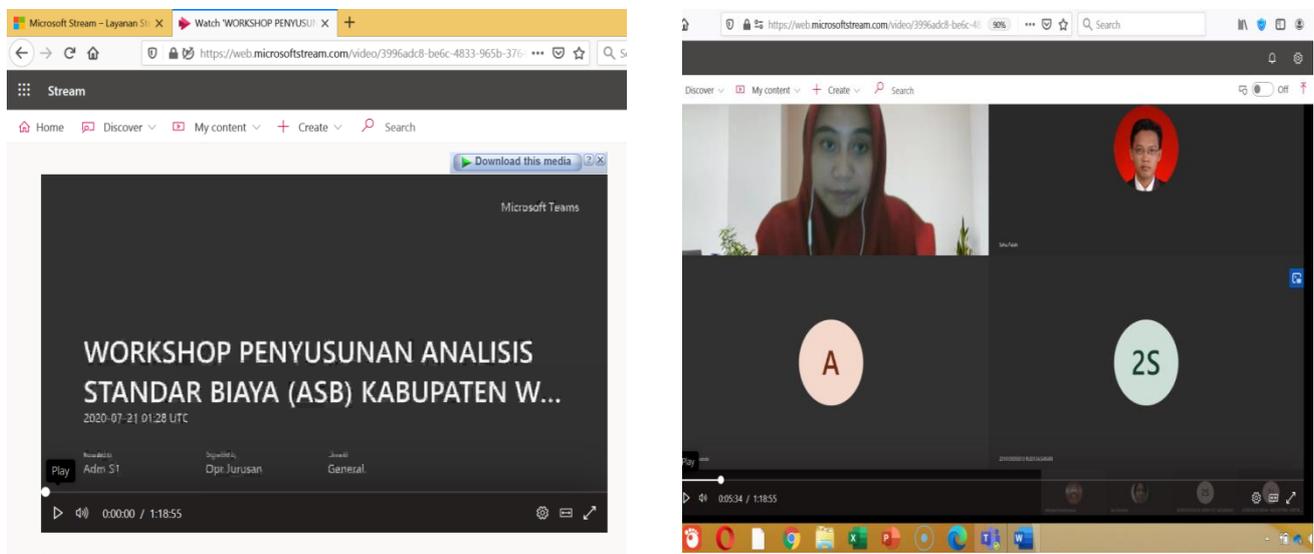
Sumber: Data diolah Penulis (2020)

4.2 Target Output

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi.

4.3 Pengaturan Monitoring Output

Kegiatan Pelatihan Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB) Kabupaten Waropen dilakukan secara online, dikarenakan situasi pandemic Covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan sosial di lingkungan masyarakat.



Gambar 1. Fotor Kegiatan Workshop Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB)

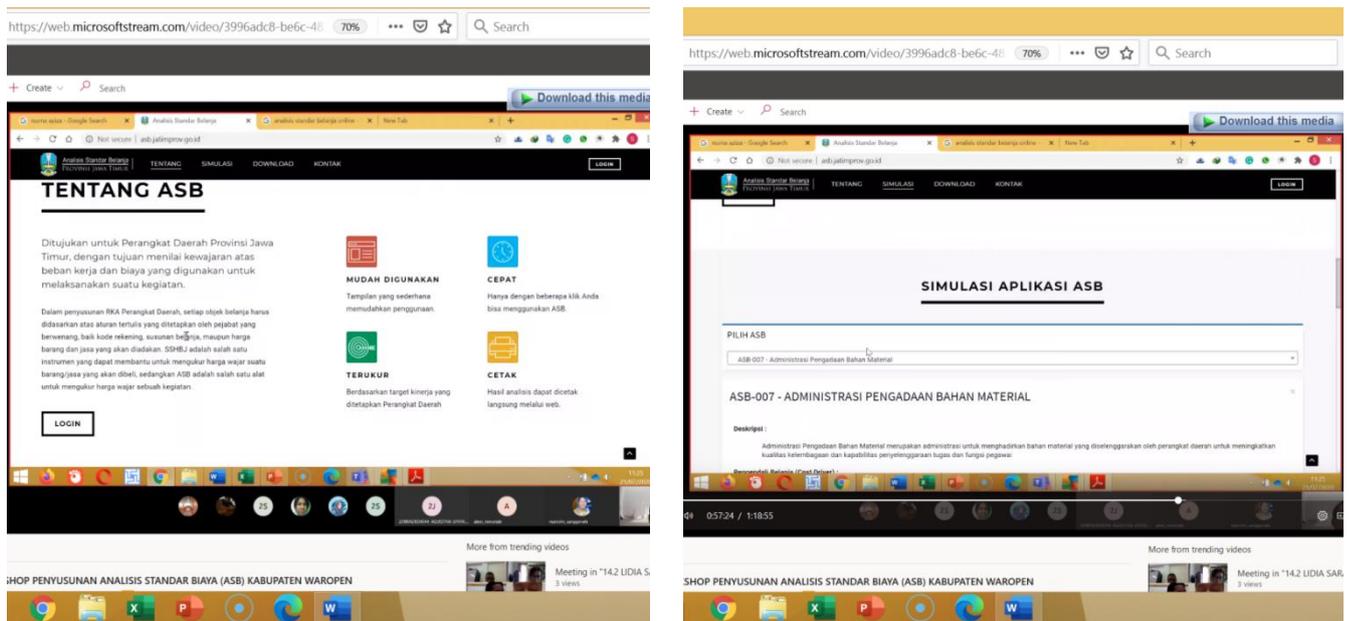
Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer, data sekunder, kunjungan lapangan untuk obsevarsi wilayah serta studi-studi yang mendukung proses penyusunan Analisis Standar Belanja. Oleh sebab itu, kebutuhan akan data dan informasi objek, terdiri dari;

- a) Dokumen Perencanaan Anggaran Kabupaten Waropen
- b) Dokumen Penganggaran Kabupaten Waropen
- c) Data dan informasi lainnya yang terkait dengan Analisis Standar Belanja (ASB)

Guna menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) di Kabupaten Waropen, maka perlu dilakukan analisis terhadap:

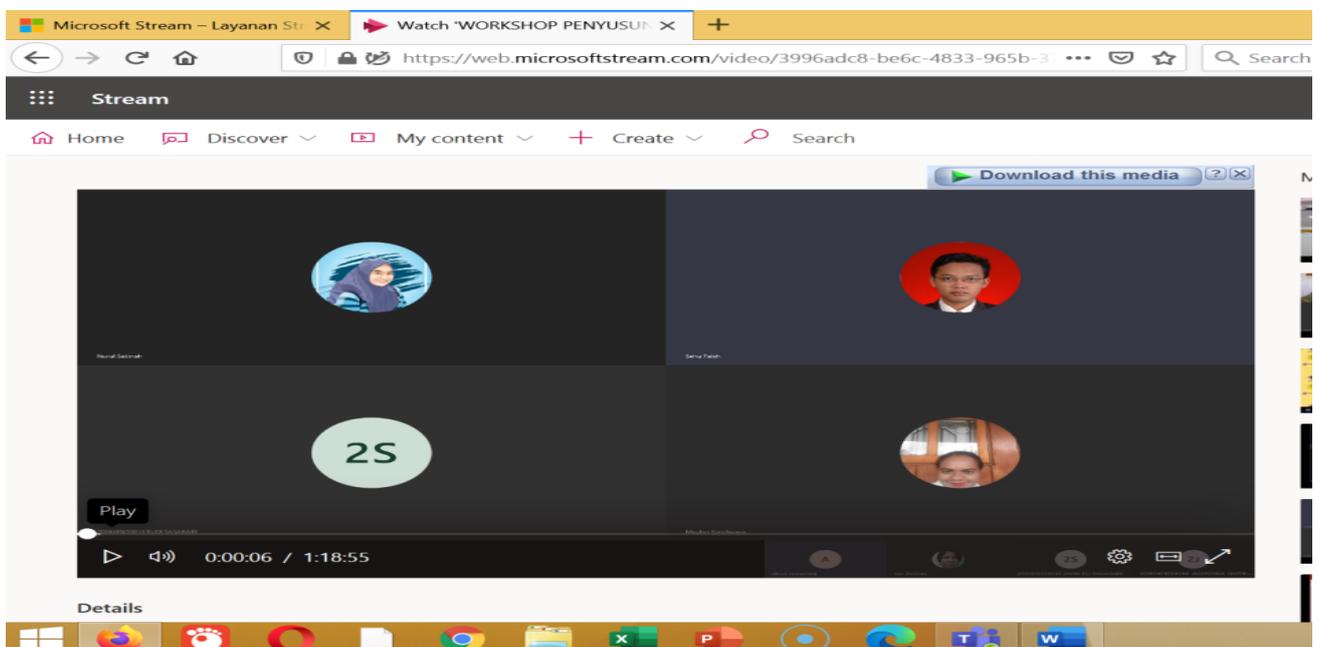
- a) Analisis Data Dasar Analisis Standar Belanja (ASB), terkait informasi tolak ukur kinerja pada dokumen perencanaan pada setiap SKPD
- b) Penyetaraan kegiatan dan mapping costdriver pada setiap rancangan Kelompok ASB

- c) Analisis terhadap biaya variable dan biaya tetap
- d) Analisis sebaran alokasi anggaran terhadap komponen belanja pada setiap usulan rencana kegiatan SKPD



Gambar 2. Foto Pengenalan tentang ASB dan Simulasi Aplikasi ASB

Perumusan hasil Analisis Standar Belanja (ASB), adalah merupakan kumpulan seluruh tahapan analisis yang diperoleh sesuai dengan hasil analisisnya yang terangkum dalam dokumen Panduan Analisis Standar Belanja Kabupaten Waropen



Gambar 3. Foto Diskusi Tentang ASB Bersama Pemateri

4.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pelatihan ini adalah para pengawas internal pemerintah Kabupaten Waropen.

5. Kesimpulan

Kegiatan pelatihan ini telah berlangsung dengan baik sesuai dengan yang direncanakan dan para peserta telah mampu untuk memahami proses dari Analisis Standar Belanja..Akan tetapi, keterbatasan dalam penelitian ini yaitu tidak jelasnya definisi suatu kegiatan pada SKPD, perbedaan output kegiatan, perbedaan lama waktu pelaksanaan, perbedaan kebutuhan sumberdaya dan beragamnya perlakuan objek atau rincian objek belanja, tetapi secara keseluruhan kegiatan pelatihan ini telah mencapai tujuan yang di harapkan.

Daftar Pustaka

- Bastian. Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Burkhead, j. 1961, government budgeting, jhon Willy & Sons Inc, Third Printed
- Djamaluddin, 1982, Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran, Ghali Indonesia
- Koswara, Enceng 2008. Administrasi Keuangan Negara. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2001. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Implementasi Value For Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publio, JAI, Vol.4.no.1.
- Kamaruddin. Ahmad, 2005. Akuntansi Manajemen: Dasar-dasar Konsep Belanja dan Pengambilan Keputusan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2010. Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3. Jakarta. Salemba Empat